

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, B. M. (2022). *Governance dalam Pelaksanaan Fasilitas PDF*. KPBU Kemenkeu. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1118-1279/public/public-study-opinion/governance-on-project-development-facility>
- Asian Development Bank. (2008). *Public-Private Partnership Handbook*. Filipina: Asian Development Bank.
- Aslamiyah, S., Haryono, B. S., & Rozikin, M. (2014). Model Partnership sebagai Upaya Strategis Peningkatan Pelayanan Air Bersih (Studi terhadap Public Private Partnership di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik). *Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang*.
- Boston. (n.d.). *Perbedaan dan Pokok Penyempurnaan PMK Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (Fasilitas PDF)*. KPBU Kemenkeu. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/37-1268/umum/kajian-opini-publik/perbedaan-dan-pokok-penyempurnaan-pmk-fasilitas-penyiapan-proyek-dan-pendampingan-transaksi-fasilitas-pdf>
- BPS Yogyakarta. (2019). *Statistik Air Bersih Daerah Istimewa Yogyakarta*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Debora, P. (2021). *Perkembangan Pelaksanaan Proses Identifikasi Proyek KPBU Potensial oleh Direktorat PDPPI*. KPBU Kemenkeu. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1099-1262/pjk/pelaksanaan-kpbu/perkembangan-pelaksanaan-proses-identifikasi-proyek-kpbu-potensial-oleh-direktorat-pdppi>
- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM DIY. (n.d.). *Sejarah Dinas DPUPESDM Jogja Prov*: <https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/profil/sejarah-dinas>
- Dinas PUP-ESDM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2018). *Renstra Perubahan DPUESDM 2017-2022*. Yogyakarta: Dinas PUPESDM.
- DJPPR Kementerian Keuangan. (2016). *Buku Saku Tahunan DJPPR*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- DJPPR Kementerian Keuangan. (2018). *Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) & Fasilitas Pemerintah untuk Mendukung Proyek KPBU*. BPSDM PU. [https://bpsdm.pu.go.id/center/pelatihan/uploads/edok/2018/08/f3603\\_KPB\\_U\\_dan\\_Fasilitas\\_dan\\_DP\\_-\\_Batam\\_27\\_Agustus\\_rev1.pptx](https://bpsdm.pu.go.id/center/pelatihan/uploads/edok/2018/08/f3603_KPB_U_dan_Fasilitas_dan_DP_-_Batam_27_Agustus_rev1.pptx)

- Hasrul. (2017). *Pentingnya Peran PDF dalam Skema KPBU*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- Kementerian Keuangan. (2018). *Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2019). *Penyiapan Proyek KPBU SPAM Regional Kamijoro Resmi Dimulai*. DJPPR Kemenkeu. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2580>
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180 Tahun 2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2022). *Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur*. KPBU Kemenkeu. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/25-230/umum/tentang-kpbu/pdppi>
- Kementerian Keuangan. (2022). *Hubungan antar Komponen dalam Studi Penyiapan Proyek KPBU*. KPBU Kemenkeu. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/76-223/umum/kajian-opini-publik/hubungan-antar-komponen-dalam-studi-penyiapan-proyek-kpbu>
- Kementerian Keuangan. (n.d.). *Dasar Hukum Skema KPBU*. KPBU Kemenkeu. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/24-229/umum/tentang-kpbu/apa-dasar-hukum-skema-kpbu>
- Kementerian Keuangan. (n.d.). *KPBU bukan Privatisasi/Swastanisasi*. KPBU Kemenkeu. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/23-228/umum/tentang-kpbu/kpbu-bukan-privatisasi-swastanisasi>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Fasilitas Penyiapan Proyek*. KPBU Kemenkeu. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1094-1255/pjpk/dukungan-pemerintah/fasilitas-penyiapan-proyek>

- Kurnia, T. (2019). *Daftar Infrastruktur yang Dibangun Bung Karno hingga Jokowi*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3906184/daftar-infrastruktur-yang-dibangun-bung-karno-hingga-jokowi>
- Mankiw, G. N. (2001). *Principles of Economics*. Jakarta: Erlangga.
- Maulana, R. M. (2021). Pemahaman dan Pembelajaran Tahap Perencanaan dan Penyiapan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*.
- Noor, M. H. (2016). *Mengenal Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Skema Public Private Partnership (PPP) di Indonesia*. KPBU Kemenkeu. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11824/Mengenal-Kerjasama-Pemerintah-dengan-Badan-Usaha-KPBU-Skema-Public-Private-Partnership-PPP-di-Indonesia.html>
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2018). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Energi Sumber Daya Mineral*. Pemerintah
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2018). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral*. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Tahun Anggaran 2019*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Rachma, I. N., & Widowati, N. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Program Kota Tanpa Kumuh (KoTaKu) di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 2.
- Sugiarto, C. E. (2019). *Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Indonesia Maju*. Setneg.

[https://setneg.go.id/baca/index/melanjutkan\\_pembangunan\\_infrastruktur\\_dan\\_indonesia\\_maju](https://setneg.go.id/baca/index/melanjutkan_pembangunan_infrastruktur_dan_indonesia_maju)

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, M. (2017). Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public-Private Partnership) di Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 2-3.
- Sukmadinata, N. S. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Syamshabrina, A. (2017). *Preferensi Pemerintah dan Badan Usaha dalam Pengembangan Lyn sebagai Angkutan Umum Feeder di Surabaya melalui Skema Kerjasama dengan Badan Usaha ((Studi Kasus : Angkutan Lyn Rute S dan Rute G Surabaya)*. Repository ITS. <https://repository.its.ac.id/46659/7/3612100060-Undergraduate-Theses.pdf>
- United States Department of Transportation. (2004, Desember). *Report to Congress on Public-Private Partnerships*. Amerika Serikat: Federal Highway Administration US.
- Wibowo, A., Utarja, J. B., & Surachman, E. N. (2020). *Panduan Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Infrastruktur Publik 2020*. Jakarta: PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia.
- Yansri, O. P. (2021). *Infrastruktur untuk Meraih Indonesia Merdeka*. KPBU Kemenkeu. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1113-1274/umum/kajian-opini-publik/infrastruktur-untuk-meraih-indonesia-merdeka>